

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN TA. 2013



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2013**

KATA PENGANTAR

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan umum bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Rakyat) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Jalan Pertanian** yang dananya bersumber dari APBN TA 2013. Sedangkan kegiatan **Pengembangan Jalan Pertanian** mendukung Tanaman Pangan, pendanaannya bersumber dari DAK TA.2013.

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama, dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keraguan-raguan dalam implementasi kegiatan di lapangan serta kendala / hambatan yang ada dapat diatasi yang pada gilirannya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal .

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan Dinas Lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dsbnya),

Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Desember 2012

**Direktur
Perluasan dan Pengelolaan Lahan,**

**Ir. Tunggul Iman Panudju, Msc
NIP.195805261987031002**

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 3 |
| C. Sasaran | 3 |
| D. Pengertian | 4 |
| II. RUANG LINGKUP KEGIATAN | 6 |
| A. Persiapan | 6 |
| B. Pelaksanaan | 7 |
| III. SPESIFIKASI TEKNIS | 8 |
| A. Norma | 8 |
| B. Standar Teknis | 8 |
| C. Kriteria | 9 |
| IV. PELAKSANAAN KEGIATAN | 11 |
| A. Cara Pelaksanaan | 11 |
| B. Tahap Pelaksanaan | 11 |
| C. Jadwal Kegiatan | 18 |
| D. Pendanaan | 18 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| V. | PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 20 |
| A. | Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi | 20 |
| B. | Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota | 21 |
| C. | Format Laporan | 22 |
| D. | Alur Laporan | 22 |
| VI. | INDIKATOR KINERJA JALAN PERTANIAN | 25 |
| A. | Indikator Keluaran (Outputs) | 25 |
| B. | Indikator Hasil (Outcomes) | 25 |
| C. | Indikator Manfaat (Benefits) | 26 |
| D. | Indikator Dampak (Impacts) | 26 |
| VII. | PENUTUP..... | 27 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|-------------|--|----|
| Lampiran 1. | Lokasi Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian Tahun 2013 | 28 |
| Lampiran 2. | Contoh Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA. 2013 | 34 |
| Lampiran 3. | Jadwal kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA. 2013 | 35 |
| Lampiran 4. | Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2013 (form PSP. 01) | 36 |
| Lampiran 4 | (lanjutan) Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP (Form PSP. 03) .. | 37 |
| Lampiran 5. | Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2013 (form PSP. 02) | 39 |
| Lampiran 5 | (lanjutan) Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP (form PSP. 04) .. | 40 |
| Lampiran 6. | Outline Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA. 2013 | 41 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan infrastruktur pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program ketahanan pangan nasional. Selain itu dukungan infrastruktur pertanian yang memadai seperti jalan sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan pertanian yang efisien. Dengan adanya jalan pengangkutan sarana produksi pertanian ke lokasi kegiatan, demikian juga hasil pertanian ke tempat pengumpulan sementara, penyimpanan, pemrosesan dan pemasaran menjadi lebih mudah dan murah sehingga usaha pertanian menjadi lebih efisien.

Infrastruktur pertanian khususnya jalan pertanian merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem usahatani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil khususnya pada sentra-sentra produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat. Jalan pertanian merupakan unsur penting sebagai sarana infrastruktur dalam pengembangan pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan

pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Didalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan terdapat Klausul Jalan Khusus yaitu jalan yang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab Kementerian terkait. Sehubungan dengan itu maka jalan pertanian dikategorikan Jalan Khusus pada kawasan pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat) sehingga pembinaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Mengacu pada UU Jalan tersebut maka pengembangan jalan pertanian harus berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai / terdapat jalan pertanian yang memadai sehingga sangat menghambat masyarakat tani dalam berusaha tani di lahannya. Oleh karena itu perlu pengembangan jalan pertanian dengan pengertian sebagai pembangunan baru, peningkatan kapasitas

atau rehabilitasi jalan pertanian agar memenuhi standar teknis untuk dilalui kendaraan yang mengangkut sarana produksi pertanian, hasil pertanian dan alat mesin pertanian.

Melalui dana Tugas Pembantuan TA 2013, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan kegiatan pengembangan jalan pertanian pada kawasan sentra produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat.

B. Tujuan

1. Tujuan kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah :

1. Jalan pertanian pada sentra produksi pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat).
2. Pada tahun 2013 kegiatan pengembangan Jalan Pertanian dialokasikan sepanjang 250 km pada kawasan hortikultura 73 km, perkebunan sepanjang 104 km, dan kawasan peternakan sepanjang 73 km, tersebar di 24 Propinsi, 99 Kabupaten/Kota.

Adapun alokasi kegiatan per Kabupaten/Kota secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Pengertian

Dalam pelaksanaan pengembangan jalan pertanian terdapat pengertian-pengertian/ istilah untuk dipahami bersama, sebagai berikut :

1. Jalan pertanian adalah jalan produksi atau jalan usahatani yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan

menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.

2. Pengembangan jalan pertanian adalah pembuatan, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi jalan pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembuatan jalan pertanian adalah membuat jalan produksi atau jalan usahatani baru sesuai kebutuhan.
 - b. Peningkatan kapasitas jalan pertanian adalah jalan produksi atau jalan usahatani yang sudah ada ditingkatkan tonase/ kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
 - c. Rehabilitasi jalan pertanian adalah memperbaiki kualitas jalan produksi atau jalan usahatani yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pengembangan jalan pertanian terdiri dari :

A. Persiapan

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan
2. Pembuatan Petunjuk Teknis
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait
4. Sosialisasi
5. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
6. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana
7. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa
8. Pembuatan Rekening Kelompok
9. Pembuatan Rancangan Teknis Sederhana
10. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
11. Transfer dana

B. Pelaksanaan

1. Konstruksi
 - a. Penyediaan bahan/material
 - b. Pelaksanaan Fisik
 - c. Pemeliharaan
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pelaporan

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis kegiatan jalan pertanian meliputi norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

A. Norma

Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan produksi atau jalan usahatani di kawasan sentra produksi pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat) sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian.

B. Standar Teknis

1. Panjang jalan pertanian untuk jalan produksi minimal sesuai dengan panjang yang ditetapkan dalam POK dan pada badan jalan dilakukan pengerasan.
2. Dimensi lebar badan jalan pertanian untuk jalan produksi minimal dapat dilalui kendaraan roda 4 dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya

disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

5. Spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dll) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dan aspirasi petani melalui musyawarah kelompok tani atau rembug desa dan dituangkan dalam desain sederhana.
6. Standar teknis kegiatan pembangunan baru/ peningkatan kapasitas/ rehabilitasi dan penyediaan bahan/material masing-masing lokasi jalan pertanian dijabarkan lebih rinci di dalam Petunjuk Teknis oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota .

C. Kriteria

Kriteria pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah :

1. Pada sentra produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat.
2. Petani bersedia bekerja dalam kelompok.

3. Petani bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk pengembangan jalan pertanian, apabila diperlukan.
4. Petani/kelompok tani bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Pembangunan jalan pertanian diharapkan sebesar-besarnya melibatkan **partisipasi** masyarakat/petani setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan pertanian direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok tani melalui musyawarah kelompok tani (Rembug Desa).

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pedoman Teknis kegiatan pengembangan jalan pertanian dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan, yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian di Propinsi.

b. Pembuatan Petunjuk Teknis

Petunjuk Pelaksanaan dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi riil yang dilaksanakan di lapangan pada masing-masing lokasi jalan pertanian.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di Kabupaten/ Kota termasuk aparat desa dan masyarakat luas, untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

e. Inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)

Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota (Tim

Teknis) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan pengembangan jalan pertanian.

f. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana.

Penetapan lokasi dan petani pelaksana berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang memenuhi ketentuan (norma, standar teknis dan kriteria), selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

g. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa.

Musyawarah kelompok tani (rembug desa) dimaksudkan untuk menyusun perencanaan secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan mereka akan merasa memiliki dan bersedia memelihara kelanjutannya. Dalam musyawarah kelompok tani (rembug desa), petugas dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator.

Hasil dari musyawarah kelompok tani menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

h. Pembuatan Rekening Kelompok

Rekening kelompok diperlukan untuk menerima transfer dana dalam rangka bantuan sosial ini dari dana Tugas Pembantuan. Rekening kelompok yang dimaksud merupakan rekening atas nama kelompok tani yang bersangkutan, dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Pemerintah terdekat. Pencairan dana oleh kelompok tani harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas bersangkutan.

i. Pembuatan Rancangan Teknis Sederhana

Rancangan teknis sederhana digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, ketersediaan bahan-bahan setempat berdasarkan musyawarah kelompok tani atau rembug desa. Rancangan teknis

sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Hasil rancangan teknis sederhana terdiri dari:

- 1) Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi pembangunan jalan pertanian dan digambar pada peta administratif desa.
- 2). Rancangan teknis sederhana terdiri dari:
 - a) Peta situasi yang menggambarkan letak jalan pertanian yang akan dikembangkan.
 - b) Gambar rancangan dan dimensi jalan pertanian yang akan dikembangkan.
 - c) Jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta rincian biaya / RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- 3). Daftar definitif nama petani penerima manfaat yang akan melaksanakan pengembangan jalan pertanian.

j. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan hasil rancangan teknis sederhana, dilaksanakan secara bersama-sama antara petani dengan petugas untuk menentukan kegiatan definitif yang akan dilaksanakan.

Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat penggunaan dana dari APBD atau swadaya petani supaya dicantumkan. Contoh penyusunan RUKK pada lampiran 2.

k. Transfer Dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Pelaksanaan / Konstruksi

a. Penyediaan Bahan/Material

Penyediaan bahan/material berupa batu pecah, sirtu atau bahan lainnya yang

diperlukan tergantung kebutuhan setempat sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

b. Pelaksanaan Fisik

- 1) Pembersihan calon lokasi jalan pertanian yang akan dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direhabilitasi.
- 2) Pembuatan baru / peningkatan kapasitas/perbaikan badan jalan di laksanakan dengan cara menimbun, meratakan dan memadatkan agar sesuai dengan standar, dimensi yang telah ditetapkan dalam rancangan teknis sederhana. Badan jalan dibentuk sedemikian rupa agar air tidak tergenang dibadan jalan.
- 3) Pembuatan/perbaikan saluran drainase pada kiri dan atau kanan bahu jalan agar air limpasan dari badan jalan dapat mengalir dengan lancar (tidak tergenang).
- 4) Pengerasan badan jalan melalui penghamparan batu pecah/kerikil dan sirtu atau bahan lain serta pemadatan

dan perataan badan jalan sesuai rancangan teknis sederhana.

- 5) Pembuatan gorong-gorong dan jembatan yang memotong badan jalan, spesifikasi dan dimensinya sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam rancangan teknis sederhana.

c. **Pemeliharaan**

Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat secara swadaya, terutama petani yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pembangunan jalan pertanian.

C. **Jadual Kegiatan**

Dinas Lingkup Pertanian kabupaten/kota supaya mengikuti jadual pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan jalan pertanian yang dituangkan dalam "**Jadual Palang**" pada Lampiran 3.

D. **Pendanaan**

Biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pengembangan jalan pertanian dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-/km pada AKUN **Belanja Bantuan**

Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk uang (573111), untuk pemberian insentif (HOK) pekerjaan fisik, pengadaan bahan/material dan sewa alat.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana untuk kegiatan jalan pertanian agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik antara lain Sosialisasi, Koordinasi, Inventarisasi CPCL, rancangan teknis sederhana, musyawarah kelompok tani (rembug desa), pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan menggunakan dana Administrasi Kegiatan, bila tidak mencukupi diharapkan dapat disediakan dari dana APBD.

Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani secara swadaya.

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan pengembangan jalan pertanian akan dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya :

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi

Kegiatan ditingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dengan tugas :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dengan tugas :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
3. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan pengembangan jalan pertanian melalui mekanisme Bantuan Sosial (transfer uang).
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Propinsi dan Pusat secara berkala.

C. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

- a. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan sesuai format Laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.
- b. Dinas Lingkup Pertanian Propinsi wajib membuat laporan rekapitulasi hasil dari laporan bulanan Kabupaten/Kota sesuai format Laporan PSP 02 dan PSP 04 terdapat pada Lampiran 5.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana pada lampiran 6.

D. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara lain data

dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

Alur laporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten / kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi.
3. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi kemudian dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.**

Telp. : 021-7805552

Fax. : 021-7805552

4. Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten / kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
5. Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.

6. Waktu pengiriman
 - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

VI. INDIKATOR KINERJA JALAN PERTANIAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian maka diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya. Indikator kinerja jalan pertanian adalah sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Indikator output adalah :

Terlaksananya pembangunan baru/peningkatan kapasitas / rehabilitasi jalan pertanian sepanjang 250 km yang terdiri dari kawasan hortikultura 73 km, perkebunan 104 km dan peternakan 73 km.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

Indikator keberhasilan (outcomes) adalah :

1. Meningkatnya kapasitas jalan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Membaiknya jalan pertanian pada kawasan pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat).
3. Tersedianya jalan pertanian pada kawasan pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat) di 99 Kabupaten/ Kota.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

Indikator manfaat (benefits) adalah :

1. Terserapnya tenaga kerja setempat (berkurangnya pengangguran) sebanyak 726.400 HOK
2. Lancarnya transportasi pengangkutan saprodi, hasil produksi dan alat mesin pertanian sesuai dengan kapasitas yang diinginkan.
3. Meningkatnya nilai tambah produk

D. Indikator Dampak (Impacts)

Indikator dampak (impacts) :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat
2. Terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya penataan lingkungan usaha tani yang lebih baik di 99 Kabupaten/ Kota
4. Terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik

VII. PENUTUP

Kegiatan pengembangan jalan pertanian dilaksanakan terutama pada sentra produksi komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat. Pengembangan jalan pertanian adalah pembuatan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan pertanian.

Partisipasi masyarakat/petani setempat dalam pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan, agar tumbuh rasa memiliki sehingga hasil kegiatan pengembangan jalan pertanian dapat dipelihara oleh petani secara swadaya serta memberikan manfaat sebesar-besarnya secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan petugas lapangan.

LOKASI KEGIATAN JALAN PERTANIAN
MENDUKUNG SUB SEKTOR HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TA.2013

| | PROPINSI / KABUPATEN | | HOR | BUN | NAK | JML | SATUAN BIAYA | TOTAL ANGGARAN |
|------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|
| T O T A L | | | 73 | 104 | 73 | 250 | 100,000,000 | 250,000,000,000 |
| 1 | JAWA BARAT | | 11 | 0 | 6 | 17 | 100,000,000 | 1,700,000,000 |
| | | Tasikmalaya | 2 | | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 1 | Sukabumi | 3 | | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | 2 | Subang | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 3 | Cianjur | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 4 | Sumedang | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 5 | Bandung | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 6 | Karawang | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 7 | | | | | | | |
| 2 | JAWA TENGAH | | 6 | 42 | 8 | 56 | 100,000,000 | 5,600,000,000 |
| | 8 | Pemalang | 2 | 3 | | 5 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| | 9 | Purbalingga | 2 | 3 | | 5 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| | 10 | Cilacap | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | 11 | Banyumas | 2 | 3 | | 5 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| | 12 | Kendal | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | 13 | Semarang | | 3 | 2 | 5 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| | 14 | Pekalongan | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | 15 | Tegal | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | 16 | Demak | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|--------------|---|----|---|----|-------------|---------------|
| | | 17 | Rembang | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 18 | Banjarnegara | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 19 | Magelang | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 20 | Temanggung | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 21 | Grobogan | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 22 | Karang anyar | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 23 | Kebumen | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 24 | Pati | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 25 | Purworejo | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 26 | Batang | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 27 | Wonosobo | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 3 | DIY | | | 0 | 4 | 4 | 8 | 100,000,000 | 800,000,000 |
| | | 28 | Bantul | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 29 | Kulon Progo | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 30 | Gunung Kidul | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 31 | Sleman | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 4 | JAWA TIMUR | | | 6 | 22 | 7 | 35 | 100,000,000 | 3,500,000,000 |
| | | 32 | Banyuwangi | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 33 | Malang | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,000,000 | 600,000,000 |
| | | 34 | Ponorogo | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 35 | Probolinggo | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 36 | Bondowoso | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 37 | Jombang | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 38 | Ngawi | | 8 | | 8 | 100,000,000 | 800,000,000 |
| | | 39 | Pasuruan | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 40 | Nganjuk | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|---|----|-------------|---------------|
| | 41 | Blitar | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 42 | Sampang | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 43 | Situbondo | | | 3 | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| 5 | NAD | | - | 5 | 4 | 9 | 100,000,000 | 900,000,000 |
| | 44 | Bener Meriah | | 2 | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 45 | Aceh Tamiang | | 3 | 2 | 5 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| 6 | SUMATERA UTARA | | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,000,000 | 1,200,000,000 |
| | 46 | Tapanuli Selatan | 2 | | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 47 | Simalungun | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 48 | Deli Serdang | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 49 | Langkat | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 50 | Serdang Berdagai | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 7 | SUMATERA BARAT | | 6 | 4 | 4 | 14 | 100,000,000 | 1,400,000,000 |
| | 51 | Tanah Datar | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,000,000 | 600,000,000 |
| | 52 | Agam | 2 | 2 | | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 53 | Pesisir Selatan | 2 | | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| 8 | RIAU | | 2 | - | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 54 | Kampar | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 55 | Pelalawan | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 9 | JAMBI | | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 56 | Kerinci | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 10 | SUMATERA SELATAN | | 4 | 4 | 2 | 10 | 100,000,000 | 1,000,000,000 |
| | 57 | OKU Timur | 2 | 2 | | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 58 | Ogan Komering Ulu | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------------------|---|---|---|----|-------------|---------------|
| | 59 | Ogan Ilir | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 60 | Lahat | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 61 | Ogan Komering Ilir | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | LAMPUNG | | 4 | 4 | - | 8 | 100,000,000 | 800,000,000 |
| | | Pesawaran | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 62 | Lampung Selatan | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 63 | Lampung Utara | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 64 | Mesuji | | 2 | | 2 | | |
| | 65 | | | | | | | |
| 12 | KALIMANTAN SELATAN | | 2 | - | - | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 66 | Barito Kuala | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | |
| 13 | KALIMANTAN TIMUR | | 2 | - | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 67 | Kutai Timur | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 68 | Kutai Kertanegara | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | |
| 14 | SULAWESI UTARA | | 2 | 2 | - | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 69 | Minahasa Utara | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 70 | Minahasa Selatan | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | |
| 15 | SULAWESI TENGAH | | - | 3 | 2 | 5 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| | 71 | Parigi Moutong | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | 72 | Banggai | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | |
| 16 | SULAWAI SELATAN | | 6 | 4 | 6 | 16 | 100,000,000 | 1,600,000,000 |
| | 73 | Bantaeng | 2 | | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 74 | Luwu Utara | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 75 | Soppeng | | | | 0 | 100,000,000 | 0 |
| | 76 | Kota Palopo | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|----------------------|---|---|---|----|-------------|---------------|
| | | 77 | Luwu | | 2 | - | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 78 | Takalar | | 2 | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 79 | Bulukumba | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 81 | Wajo | | | 2 | 2 | | |
| 17 | SULAWESI TENGGARA | | | 2 | 3 | 2 | 7 | 100,000,000 | 700,000,000 |
| | | 82 | Kolaka | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | | 83 | Muna | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 84 | Buton | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | | |
| 18 | BALI | | | 2 | - | 6 | 8 | 100,000,000 | 800,000,000 |
| | | 85 | Gianyar | 2 | | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | | 86 | Badung | | | 4 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | | | | | | | | | |
| 19 | NTB | | | 2 | - | 4 | 6 | 100,000,000 | 600,000,000 |
| | | 87 | Lombok Timur | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 88 | Bima | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 89 | Sumbawa Barat | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | | |
| 20 | NTT | | | 4 | 3 | 4 | 11 | 100,000,000 | 1,100,000,000 |
| | | 90 | Timor Tengah Selatan | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 91 | Timor Tengah Utara | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 92 | Alor | | 3 | | 3 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| | | 93 | Sumba Barat Daya | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 94 | Kupang | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | | |
| 21 | PAPUA | | | 2 | - | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | | 95 | Nabire | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | 96 | Merauke | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|---|---|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 22 | BANTEN | | 2 | - | - | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 97 | Lebak | 2 | | | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | |
| 23 | GORONTALO | | - | - | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | 98 | Pohuwato | | | 2 | 2 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| | | | | | | | | |
| 24 | PAPUA BARAT | | 2 | - | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| | 99 | Sorong | 2 | | 2 | 4 | 100,000,000 | 400,000,000 |

Lampiran 2.

Contoh

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) PENGEMBANGAN JALAN PERRTANIAN

Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa :
Nama Kelompok Tani :

| Jenis Pekerjaan | Volume/satuan | Harga Per Satuan | Jumlah Biaya & Sumber Dana | | | Metode Pelaksanaan |
|---|----------------------|------------------|----------------------------|------|----------------|--------------------|
| | | | Tugas Pembantuan | APBD | Swadaya Petani | |
| a Penyediaan Bahan/Material | | | | | | |
| - Pasir | M ³ | | | | | |
| - Batu | M ³ | | | | | |
| - Semen | Zak | | | | | |
| - Besi | Batang | | | | | |
| - Bata | Buah | | | | | |
| - Lain-lain(sebutkan) | | | | | | |
| b Pelaksanaan Fisik | | | | | | |
| - Pembersihan badan jalan | HOK | | | | | |
| - Pengerasan badan jalan | HOK | | | | | |
| - Pembuatan/perbaikan saluran di kanan kiri jalan | HOK | | | | | |
| - Penanaman rumput pada tebing jalan | HOK | | | | | |
| - Pembuatan/perbaikan gorong-gorong, jembatan | HOK | | | | | |
| - Penimbunan dan perataan | HOK | | | | | |
| - Lain-lain(sebutkan) | | | | | | |
| TOTAL DANA | | | | | | |

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

TimTeknis/ Korlap

Ketua Kelompok Tani

()

()

()

Lampiran 4 (lanjutan)

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| 1 | Perluasan dan Pengelolaan Lahan | | |
| | 1. Cetak Sawah | | |
| | 2. JALAN PRODUKSI | | |
| | 3. UPPFO | | |
| | 4. Optimalisasi Lahan | | |
| | 5. dst | | |
| 2 | Pengelolaan Air Irigasi | | |
| | 1. JITUT | | |
| | 2. JIDES | | |
| | 3. Teta Air Mikro (TAM) | | |
| | 4. dst | | |
| 3 | Alat dan Mesin Pertanian | | |
| | 1. Tractor Roda 2 | | |
| | 2. Tractor Roda 4 | | |
| | 3. dst | | |
| 4 | Pupuk dan Pestisida | | |
| | 1. Penguatan KP3 | | |
| | 2. Skrening Pestisida | | |
| | 3. dst | | |
| 5 | Pembiayaan | | |
| | 1. PUJAP | | |
| | 2. dst | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Proplinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/A. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
 - a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - b. Rehab JITUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan pertuasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 (lanjutan)

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN JALAN PERTANIAN TA. 2013**

| KEGIATAN | | BOBOT (%) |
|-----------|---|-----------|
| | | |
| A. | PERSIAPAN | 20 |
| 1 | SK Tim Teknis | 2 |
| 2 | CPCL | 3 |
| 3 | Desain | 4 |
| 4 | RUKK | 4 |
| 5 | Perjanjian kerjasama dan pembukaan rekening | 4 |
| 6 | Transfer Dana | 3 |
| | | |
| B. | PELAKSANAAN / KONSTRUKSI | 80 |
| 1 | Penyediaan bahan/material | 30 |
| 2 | Pelaksanaan Fisik | 50 |

Lampiran 5

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2012

Form PSP.02

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

| No. | Dinas Kabupaten/Kota ¹⁾ | Aspek/Kegiatan | Pagu DIPA | | Realisasi Terhadap Pagu DIPA | | | | Keterangan |
|---------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----|--------------------|--|------------|
| | | | Anggaran (Rp) | Fisik (Ha/Km/Unit) | Anggaran (Rp) | | Fisik (Ha/Km/Unit) | | |
| | | | | | (%) | (%) | | | |
| 1 | Dinas Kab/Kota No. SP DIPA : | A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan | | | | | | | |
| | | 1. Cetak Sawah | | | | | | | |
| | | 2. JUT | | | | | | | |
| | | 3. Japrod | | | | | | | |
| | | 4. Optimasi Lahan | | | | | | | |
| | | 5. dst | | | | | | | |
| | | B. Pengelolaan Air Irigasi | | | | | | | |
| | | 1. JFTU | | | | | | | |
| | | 2. JI/DES | | | | | | | |
| | | 3. Tata Air Mikro (TAM) | | | | | | | |
| | | 4. dst | | | | | | | |
| | | C. Alat dan Mesin Pertanian | | | | | | | |
| | | 1. Tractor Roda 2 | | | | | | | |
| | | 2. Tractor Roda 4 | | | | | | | |
| | | 3. dst | | | | | | | |
| | | D. Pupuk dan Pestisida | | | | | | | |
| | | 1. Penguatan KP3 | | | | | | | |
| | | 2. Skrening Pestisida | | | | | | | |
| 3. dst | | | | | | | | | |
| E. Pembiayaan | | | | | | | | | |
| 1. PUAP | | | | | | | | | |
| 2. dst | | | | | | | | | |
| 2 | Dinas Kab/Kota No. SP DIPA : | JUMLAH | | | | | | | |
| | | 1. Cetak Sawah | | | | | | | |
| | | 2. JUT | | | | | | | |
| | | 3. Optimasi Lahan | | | | | | | |
| | | 4. JFTU | | | | | | | |
| | | 5. Tractor Roda 2 | | | | | | | |
| | | 6. dst | | | | | | | |

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta. Fax : 021 7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
 *) Ditisi name Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2012
 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 5 (lanjutan)

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)

Form PSP-04

| | | | | |
|-------------|-------|--|--|--|
| Dinas : | | | | |
| Provinsi : | | | | |
| Subsektor : | | | | |

| NO | DINAS KAB/KOTA | ASPEK/KEGIATAN | Target Fisik DIPA | Realisasi Fisik | MANFAAT |
|----|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | Dinas.....**) | A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan | | | |
| | Kab/Kota | 1. Cetak Sawah | | | |
| | No SP DIPA | 2. JUT | | | |
| | | 3. Japrod | | | |
| | | 4. Optimalisasi Lahan | | | |
| | | 5. dst | | | |
| | | B. Pengelolaan Air Irigasi | | | |
| | | 1. JITU | | | |
| | | 2. JIDES | | | |
| | | 3. Tais Air Mikro (TAM) | | | |
| | | 4. dst | | | |
| | | C. Alat dan Mesin Pertanian | | | |
| | | 1. Tractor Roda 2 | | | |
| | | 2. Tractor Roda 4 | | | |
| | | 3. dst | | | |
| | | D. Pupuk dan Pestisida | | | |
| | | 1. Penguatan KP3 | | | |
| | | 2. Skrening Pestisida | | | |
| | | 3. dst | | | |
| | | E. Pembiayaan | | | |
| | | 1. PUJAP | | | |
| | | 2. dst | | | |
| 2 | Dinas.....**) | | | | |
| | Kab/Kota | | | | |
| | No SP DIPA | | | | |

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cc: Bagian Evaluasi dan Pelaporan di/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JITU/JIDES seluas 500 Ha, menaikkan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 X Ton = 1.250 ton
 - Rehab JITU/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyediakan peralatan areal taras seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Istilah nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

2012
Penanggungjawab Kegiatan Propinsi

Lampiran 6.

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN
TA. 2013**

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi
- 2.2. Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 4.1 Tahapan Kegiatan
- 4.2 Realisasi Fisik dan Keuangan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- 5.1 Permasalahan Yang Dihadapi
- 5.2 Pemecahan Masalah

VI. ANALISIS KINERJA

Input, Output, Outcome, Impact

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII. PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0%, 50%, 100%.
- 2. Rancangan teknis sederhana dan RUKK.

